

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Agam Dalam Angka*, Lubuk Basung: BPS, 1991.
- _____, *Ampek Nagari Dalam Angka 2015*, Lubuk Basung: BPS, 2015.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- C.S.T Kansil, *Pemerintah Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kurnia Warman, dkk., *Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan Di Sumatera Barat*, Jakarta: HuMa-Qbar, 2009.
- LBH Padang, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*, Padang: LBH Padang atas dukungan Yayasan TIFA, 2005.
- Nawir Sikki, dkk., *Pemberdayaan & Penguatan Posisi Masyarakat Nagari & Laggai*, Padang: Jembatan Pemilu dan UNDP, 2004.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zenwen Pador.dkk, *Kembali Ke Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak ?*, Jakarta: LBH Padang-Sinar Grafika, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentani/OT.140/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Nagari.

C. Internet / Website

Badan Pusat Statistik, *Perkebunan*, <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/54>, diakses tanggal 15 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

Ebookinga, *Kemitraan Dalam Perkebunan Kelapa Sawit*, <http://ebookinga.com/pdf/kemitraan-dalam-perkebunan-kelapa-sawit-321093423.html>, diakses tanggal 15 Juni 2016 pukul 15.40 WIB.

KBBI Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pengertian Tanah*. <http://www.kbbi.web.id>, diakses tanggal 20 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.

Kurnia Warman dan Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat*. <http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id>, diakses tanggal 20 Maret 2016 pukul 15.20 WIB.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, *Defenisi (Arti) Perkebunan*. <http://www.perkebunan.litbang.pertanian.go.id>, diakses tanggal 22 Maret 2016 pukul 14.05 WIB.

